

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Achmad, 2008, *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ali, Afandi, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arto, H.A. Mukti, 1998, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- As-Shabuni, Muhammad Ali, 1996, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Yogyakarta.
- Budiono, Harlien, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Eman, Suparman, 1991, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya. 1993, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kie, Tan Thong, 2007, *Studi Notaris & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Edisi Revisi Cet. Ke 3*, Kencana, Yogyakarta.
- Menggala, Hasan Basri Nata dan Sarjita, 2008, *Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah*, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta.
- Parlindungan, A.P, 1993, *Komentar atas UUPA*, Mandar Maju, Bandung.
- Pateda, Mansoer, 2001, *Semantik Leksikal*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Prodjodikoro, R. Wirjono, 1995, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- S., Tamakiran, 2000, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistim Hukum*, Pionir Jaya, Bandung.
- Satrio, J., 1992, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung.
- , 1998, *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Menurut Undang-Undang*, Prenada Media, Jakarta.
- , 2006, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Kencana Renada Media Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2003, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeroso, R., 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo, Jakarta.
- Suteja, Adrian, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta.
- Utrecht, E., 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. PT Icthiar Baru, Jakarta.

## **B. Makalah/ Jurnal**

- Whenayu Teguh Puspa, “Tanggungjawab Notaris Terhadap Kebenaran Akta Di Bawah Tangan yang Dilegalisasi Oleh Notaris”, *Jurnal Repertorium Volume III No.2*, Juli-Desember 2016.
- Upik Hamidah, “Peran Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah dalam Pelayanan Pertanahan”, *Fiat Justitia Ilmu Hukum Volume 5 No.2*, ISSN 1978-5186, Edisi 2 Mei- Agustus 2012.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Staatsblad* 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1989, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Kota Yogyakarta

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Kelurahan Di Lingkungan Kota Yogyakarta

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Dan Pembinaan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tanggal 19 Juni 1980 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Balai Harta Peninggalan.

Kompilasi Hukum Islam

**D. Tesis dan Disertasi**

Huda, U'ud Darul, 2011, "Tinjauan Yuridis Surat keterangan ahli waris Bagi Warga Negara Indonesia Asli di Kota Surakarta", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Masuli, Hoiril, 2010, "Penggunaan Surat keterangan ahli waris Untuk Pendaftaran Tanah di Kota Yogyakarta", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

**E. Kamus**

Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV*, Balai Pustaka, Jakarta.

Subekti, R, 2003, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.